

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK memiliki visi dan misi yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang kredibel yang menjunjung nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam memajukan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. BPK berpusat di Jakarta dan dalam mempermudah pemeriksaannya di daerah BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berkedudukan di Pulau Sumatera. Ibu kota dari provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> ini adalah Padang. Pada tanggal 26 Oktober 2007 diresmikan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat.

Disebutkan pada Rencana Strategis BPK Sumatera Barat 2016-2020, memiliki tugas yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mencakup Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga yang terkait pada bagian entitas dalam melakukan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN). Terdapat pemangku kepentingan

yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), dan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta internal BPK.

Hasil pelaporan yang sudah diperiksa oleh BPK dituangkan dalam LHP BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) merupakan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara. Terdapat banyak pihak yang menggunakan informasi keuangan yang ditampilkan dan dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah dengan kegunaan yang berbeda-beda, sehingga laporan yang ditampilkan tersebut harus memiliki kualitas.

Merujuk kepada penelitian Sutanta (2011), informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga dapat menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan memiliki fungsi sebagai dasar pada pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada masa yang akan datang. Williams & Sawyer (2007) juga mengungkapkan bahwa informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain sebagai tujuan pengambilan keputusan. Informasi yang baik merupakan suatu informasi yang dapat dibaca dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Kriteria yang *readable* sebaiknya harus dimiliki suatu laporan agar dapat memperlihatkan bahwa suatu tulisan dapat dibaca dan dipahami.

Pada dunia bisnis, salah satu laporan yang merupakan sumber informasi utama bagi banyak pihak adalah laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan dan informasi naratif lainnya. Menurut Luo, Jin-hui, Li, & Chen (2018), informasi yang disajikan melalui laporan tahunan dapat dikatakan tersampaikan dengan baik apabila mencapai tingkat *readability* yang tinggi. Saat ini laporan tahunan telah berkembang dan didominasi oleh informasi dalam bentuk teks naratif dibandingkan data kuantitatif. Perkembangan dari pelaporan tahunan yang didominasi oleh teks naratif ini sebaiknya diikuti dengan kemampuan yang baik bagi pengguna laporan tahunan dalam memahami teks naratif tersebut. Menurut Lo, Ramos, & Rogo (2017) *readability* pada suatu laporan tahunan merupakan hal yang penting dalam memahami teks naratif.

Berdasarkan SFAC No. 8 poin 1 menyatakan bahwa suatu laporan keuangan yang baik harus bisa dipahami dengan mudah oleh penggunanya. Berdasarkan karakteristik laporan tahunan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, menyebabkan pentingnya pemahaman pembaca terhadap laporan tahunan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 bagian III tentang isi laporan tahunan poin b menyatakan bahwa dalam menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram pada suatu laporan tahunan dapat dengan menyertakan judul dan/atau keterangan yang jelas, agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh penggunanya.

Menurut Janan & Wray (2012), secara umum fokus dari penelitian terkait keterbacaan adalah pada metode praktikal untuk mencocokkan teks bacaan

dengan kemampuan pembacanya yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan pembaca. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan adalah panjang pendeknya kalimat dan kata. Pada umumnya apabila semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata-kata, maka bahan bacaan dimaksud semakin sukar. Dalam mengukur tingkat suatu keterbacaan terdapat beberapa alat ukur atau formula yang diantaranya adalah *Gunning Fog Index*, *Flesch Reading Ease*, *Length of Document*, *Coleman-liu Index*, *Spache*, *Dale & Chall*, *Automated Readability Index*, *Smog Index*, dan lain-lain (Hafni, 1981).

Pada penelitiannya, Courtis (1995) juga menyatakan bahwa untuk peningkatan keterbacaan laporan tahunan, perusahaan sebaiknya menyajikan laporan menggunakan kalimat yang singkat, penggunaan kata-kata yang singkat dan sederhana, serta memperhatikan format dalam penulisan informasi untuk meningkatkan minat dari pembaca. Hal ini juga ditunjang oleh penelitian oleh Li (2008) yang menggunakan panjang kalimat sebagai salah satu proksi untuk mengukur keterbacaan laporan tahunan dari suatu perusahaan.

Baker & Kare (1992) menuturkan bahwa laporan tahunan dapat dikatakan handal pada suatu media dalam berkomunikasi antara manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dengan pemangku kepentingan perusahaan yang berlaku sebagai prinsipal. Pengguna dari laporan tahunan bertujuan menggunakan laporan tahunan sebagai suatu referensi dalam mengambil keputusan pada saat melakukan investasi, pendanaan, serta berbagai tujuan lain sehingga perusahaan diharuskan menyajikan informasi yang ada pada laporan tahunan secara tepat waktu, akurat, dapat dibaca dan dipahami. Informasi tersebut harus didukung

dengan kualitas keterbacaan yang baik agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai terutama dalam pengambilan keputusan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut maka fenomena pentingnya peran dari keterbacaan ini juga dapat diadopsi bagi Pemerintah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dihasilkan sesuai dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tujuan dari Pemeriksaan keuangan Negara yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan Negara sebagaimana dengan yang telah disajikan. Setelah itu pada LHP BPK terdapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (THLP BPK). Menurut Akmal (2006), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) merupakan suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses tersebut diperlukannya suatu komitmen demi hasil yang baik pada saat melakukan pemeriksaan temuan yang dilaporkan.

Komitmen sangat penting bagi masing-masing individu dalam membentuk serta membangun kerjasama, meningkatkan motivasi dalam bekerja, dan menciptakan loyalitas. Steers & Porter (1983) menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan, adanya komitmen yang tinggi akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya komitmen yang tinggi maka setiap

individu akan mempunyai kinerja yang lebih baik pada saat bekerja, serta berpartisipasi penuh dalam pencapaian tujuan dari tempat bekerja.

Mengacu pada Rencana Strategis BPK Sumatera Barat 2016-2020, Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Tidak hanya itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK adalah salah satu penentu keberhasilan dari upaya BPK agar dapat memperbaiki pengelolaan dari keuangan negara. Sampai dengan laporan terakhir pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum memperlihatkan adanya suatu capaian, yaitu presentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang mana baru mencapai 55%. Selain itu juga dinyatakan dalam Rencana Strategis BPK Sumatera Barat 2016-2020, terdapat bahwa BPK sendiri menargetkan presentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2020 sebesar 80%. Dengan adanya fenomena ini, menjadi perhatian bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK agar kedepannya keberadaan BPK dapat lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka tercapainya target penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2020 sebesar 80%, diperlukan keterbacaan yang baik dalam LHP BPK agar terciptanya komitmen penyelesaian yang baik terhadap tindak lanjut temuan pada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, dalam memaksimalkan pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan, pemeriksa perlu memahami dan mempraktekkan nilai-nilai dasar BPK yakni integritas, independensi, dan profesionalisme untuk menjaga kredibilitas BPK. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut, diharapkan kedepannya dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi entitas dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan indikator kepuasan pemeriksaan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, pada penelitian ini membahas Pengaruh Keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Terhadap Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat/level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) oleh Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang pada tahun 2015-2017?
2. Bagaimana Pengaruh keterbacaan temuan LHP BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Menganalisis tingkat/level keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) oleh Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang pada tahun 2015-2017.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh keterbacaan temuan LHP BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan pada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi, yang mana penelitian ini mengaitkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai suatu pengkajian di bidang Akuntansi, dengan teori keterbacaan yang merupakan bidang pembahasan di bidang sastra.



## 2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penelitian ini bisa diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPK untuk menyampaikan informasi secara tepat dan mudah dipahami bagi pengguna.

## 3. Bagi Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa terdapat unsur-unsur *readability* pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK agar tujuan penyampaian informasi tercapai.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang tersistematis dengan susunan sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini dijelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas juga diuraikan dalam bab ini. Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian serta kerangka teori.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas desain penelitian, populasi dan sampling, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel yang digunakan, dan metode analisis.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan, hasil pengujian hipotesis serta akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah awal.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan keterbatasan penelitian serta saran yang akan diberikan guna penelitian berikutnya terkait penelitian ini.

